

## Training on the Importance of Making Financial Reports for MSME in Ujung Rambe Village

Novien Rialdy<sup>1\*</sup>, Sultan Farid Fauzi Hasibuan<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Corresponding Author:** Novien Rialdy [novienrialdy@umsu.ac.id](mailto:novienrialdy@umsu.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keyword* : Training, Business, Financial Report, MSME

*Received* : 19 October

*Revised* : 22 November

*Accepted*: 29 December

©2022 Rialdy, Hasibuan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This community service is carried out with the aim of being able to assist the community in financial reporting mechanisms, especially for MSMEs in Ujung Rambe Village. Financial reports serve as a tool for analyzing financial performance which can provide information about financial position so that it can be used as a basis for making decisions. MSMEs are productive businesses owned by individuals or business entities that meet the criteria of being a micro business. Financial reports are a form of MSME accountability. Even though in villages, village communities cannot be left behind regarding financial reports, financial reports are made to present information regarding the performance of MSMEs. The result of this service is to increase understanding of the importance of MSME financial reports. The method in this service uses descriptive because the service obtained is based on the results of interviews with village heads, village officials and the community. The media used is in the form of documents. The importance of financial reports to MSMEs with the hope that MSMEs in Ujung Rambe Village are able to know the performance of the business being run and can be used for decision making. By holding student services to Ujung Rambe Village, it can overcome problems that do not yet know about financial reports. Hopefully with this training the problems in Ujung Rambe Village can be overcome.

## Pelatihan Pentingnya Membuat Laporan Keuangan pada UMKM di Desa Ujung Rambe

Novien Rialdy<sup>1\*</sup>, Sultan Farid Fauzi Hasibuan<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Corresponding Author:** Novien Rialdy [novienrialdy@umsu.ac.id](mailto:novienrialdy@umsu.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pelatihan, Bisnis, Laporan Keuangan, UMKM

*Received :* 19 October

*Revised :* 22 November

*Accepted:* 29 December

©2022 Rialdy, Hasibuan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mekanisme pelaporan keuangan khususnya untuk UMKM di Desa Ujung Rambe. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan yang dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat keputusan. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban UMKM. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi mengenai kinerja UMKM. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman pentingnya laporan keuangan UMKM. Metode dalam pengabdian ini menggunakan deskriptif karena pengabdian yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada kepala desa, perangkat desa dan masyarakat. Media yang digunakan berupa dokumen. Pentingnya laporan keuangan pada UMKM dengan harapan UMKM di Desa Ujung Rambe mampu mengetahui kinerja bisnis yang dijalankan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan diadakannya pengabdian mahasiswa ke Desa Ujung Rambe dapat mengatasi permasalahan yang belum mengetahui tentang laporan keuangan. Semoga dengan adanya pelatihan ini permasalahan di Desa Ujung Rambe dapat diatasi.

---

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai unit usaha masyarakat harus mampu berinovasi dan menjawab tantangan zaman. Inovasi yang dilakukan perlu diimbangi oleh penguasaan aspek teknologi yang memadai guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, salah satunya pengelolaan laporan keuangan (Kasmir, 2012). Saat ini, masih banyak ditemukan UMKM yang belum paham akan fundamentalnya peran laporan keuangan (Munawir, 2010). Laporan keuangan usaha hanya dibuat seadanya, ditulis manual dengan format seadanya, dan tidak menggunakan standar prinsip akuntansi yang tepat. Akibatnya adalah seringkali terdapat kekeliruan dalam penarikan kesimpulan terhadap status laba/rugi dari UMKM karena tidak tertibnya pelaporan keuangan usaha. menyatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan suatu negara, tetapi status pengelolaan keuangannya masih belum tersaji dengan baik, hal ini mengakibatkan isi dari laporan keuangan UMKM seringkali tidak lengkap, tidak tercatat dengan rapi, dan tidak mencerminkan status usaha yang sebenarnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Pembuatan laporan keuangan masih dinilai sulit, terlebih bagi UMKM yang masih beroperasi dengan skala kecil. Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara luring di Desa Ujung Rambe, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. (Muditomo, 2012)

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk (Bank Indonesia, 2015) pertanggungjawaban UMKM walaupun masih kategori usaha mikro. laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi mengenai kinerja UMKM dan berguna untuk mengambil keputusan bisnis. Dengan pemahannya mengenai laporan keuangan dan mengerti cara menyusun laporan keuangan membuat mengetahui kinerja bisnis yang dijalankan. Dan masyarakat harus mengetahui laporan keuangan untuk kelangsungan bisnis (Danang, 2013).

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pengertian UMKM diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. (Octavia et al., 2016) Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi (Pertiwi et al., 2020).

Masih banyaknya UMKM di Indonesia yang belum mengetahui, dan membuat serta menyusun laporan keuangan. Ada 6 langkah dalam proses pembuatan laporan keuangan, yaitu mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal, memposting jurnal ke buku besar, menyusun neraca saldo, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca lajur yaitu untuk memudahkan menyusun laporan keuangan, (Amoako, 2013) dan membuat laporan keuangan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat penting. Karena mencerminkan kinerja bisnis dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep UMKM

#### 1. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.(Undang-Undang, 2008) Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.(Tambuhan & Nazwar, 2009) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.(Bank Indonesia, 2015) Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, 2012) Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.(Undang-Undang, 2008)

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.masa depan pembangunan terletak pada

kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. (Uskara, 2021)

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri (Abdulloh, 2021). Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan. (Wilantara & Susilawati, 2016)

## 2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
  - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
  - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Muditomo, 2012).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati ). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara

lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. (Hanım et al., 2018)

### 3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015)

- 1) Livelihood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

### 4. Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. (Ayodya, 2020)

### 5. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari

pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:(Anoraga, 1997)

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.(Wilantara & Susilawati, 2016).

## **6. Kekuatan dan Kelemahan UMKM**

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:



1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

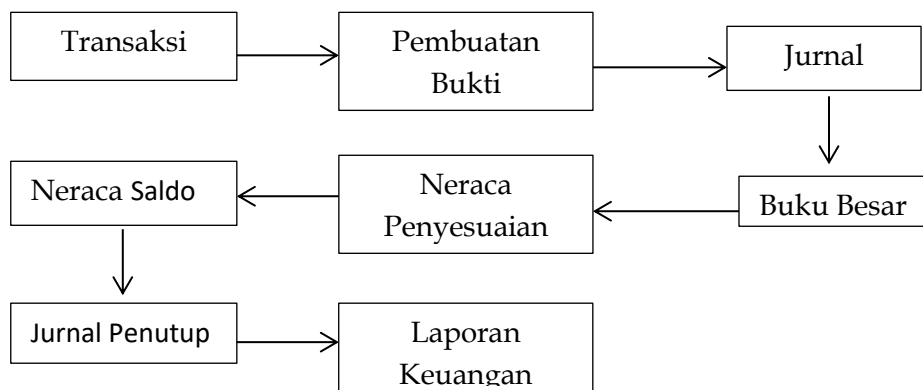
- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor eksternal

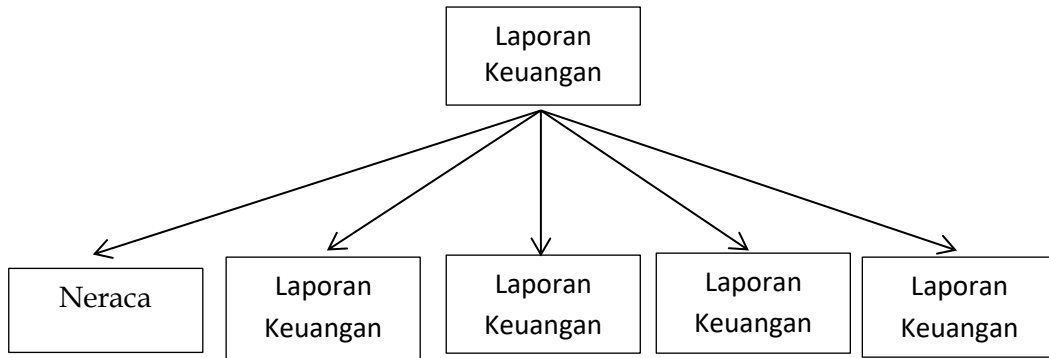
Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi olehUMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun. Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan bagian dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi menurut (Wijaya, 2018) adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus Akuntansi



Gambar 2. Laporan Keuangan

Menurut (Harnanto, 2019), Tujuan umum adanya laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi yang bisa diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
- b. Menyajikan informasi yang bisa diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- c. Menyajikan informasi yang bisa diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
- d. Menyajikan informasi yang bisa membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
- e. Menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan para pemakainya.

Dengan tujuan laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas haruslah menyajikan laporan yang dapat diandalkan. Laporan keuangan yang dapat diandalkan haruslah wajar dan mudah dipahami untuk memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh pihak - pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), Penyajian wajar laporan keuangan memiliki syarat entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan :

- a. Relevan : informasi bisa digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan
- b. Representasi tepat : informasi dalam laporan keuangan menunjukkan secara tepat apa yang akan dipresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- c. Keterbandingan : informasi dalam laporan keuangan entitas bisa dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
- d. Keterpahaman : informasi yang disajikan bisa dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai dan kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

Menurut (Amani, 2018), Dalam SAK EMKM Laporan Keuangan entitas minimal terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun- akun berikut: kas dan setara kas adalah, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas.
- b. Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut : pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak.
- c. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan memuat : suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan entitas.

Meskipun UMKM hanya perlu menyajikan ketiga laporan tersebut, UMKM juga diperbolehkan untuk menyajikan laporan keuangan yang lainnya jika diperlukan yaitu Laporan perubahan ekuitas dan Laporan Arus Kas (Sujarweni, 2018).

## **B. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya – tidaknya selama 2 tahun berturut – turut. Menurut (Undang-Undang, 2008) dalam (Hanim et al., 2018), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.
- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

Tabel 1. Kriteria Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 jt	Maks 300 jt
2	Usaha Kecil	>50 jt - 500 jt	> 300 jt - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 jt - 10 Milliar	>2,5 Milliar --50 Milliar

Sumber : [www. Depkop.go.id](http://www.Depkop.go.id)

### C. Akuntansi

Menurut (Sujarweni, 2018) menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Menurut (Hadri, 2013), Pengertian Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.

### D. SAK EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah)

SAK EMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang diperuntukkan bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Sebelum adanya SAK EMKM, pemerintah sempat menyarankan para pelaku Usaha kecil dan menengah untuk melaksanakan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang diterbitkan oleh (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. Menurut (Amani, 2018), Biaya Historis suatu asset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan, biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal (Wijaya, 2018). Dasar pengukuran ini diambil sebagai dasar karena banyak dari pelaku UMKM masih banyak melakukan pencatatan bahkan sangat jarang yang melakukan pembukuan (Omega & Mardiana, 2020). Inilah sebabnya, SAK EMKM dibuat sesederhana mungkin, karena keterbatasan pelaku UMKM dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang dianggap kurang begitu berdampak bagi usaha mereka dan tidak ada tenaga kerja yang andal untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Warsono et al., 2010).

## **METODOLOGI**

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Implementasi penyusunan laporan keuangan pada UMKM berdasarkan SAK EMKM (study kasus pada Desa Ujung Rambe Kabupaten Deli Serdang). Adapun obyek penelitian adalah implementasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM (Kuncoro, 2009). Maka definisi yang perlu dijelaskan yaitu, suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci yang bertujuan agar pencatatan dilakukan dengan benar dan sesuai SAK EMKM pada Pengrajin keripik pisang, gula aren dan sembako. Dengan berfokus pada siklus atau proses akuntansi yang ada, mulai dari transaksi yang dilakukan seperti apa, bagaimana pencatatan yang dilakukan selama ini oleh pemilik, bagaimana penjurnalan yang dilakukan, akun buku besar apa saja yang ada selama ini dan sudah dicatat, bagaimana penyesuaian yang dilakukan diakhir tahun hingga penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM yang belaku dapat diterapkan atau tidak. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Arikunto, 2010). Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya (Sugiyono, 2012). Penelitian yang dilakukan bertempat di desa Ujung Rambe Kabupaten Deli Serdang.

Penulis menggunakan metode ini karena dalam melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Informasi yang didapatkan yaitu berdasarkan hasil wawancara kepada kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Media yang digunakan berupa dokumen. (Effendi, 2012).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pemodalannya dalam dunia UMKM masih bergantung dari pendapatan usaha yang didapat perbulan ditambah dengan modal pemiliknya. Namun untuk mendukung berkembangnya usaha, dibutuhkan modal yang besar untuk bisa memfasilitasi kinerja setiap pekerjaan yang ada (Kompas, 2022). Untuk mendapatkan tambahan modal, setiap usaha perlu untuk menambah modalnya dengan salah satu cara yaitu meminjam dari bank. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai implementasi penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM yang meneliti kasus pada pengrajin keripik pisang, gula aren dan sembako yang berlokasi di desa Ujung Rambe Kabupaten Deli serdang (Amani, 2018). Dalam usahanya, perbulan omzet yang bisa diraup oleh usaha ini dapat kurang dari 40 juta.

### **Hasil Penelitian**

Alasan, Kendala, dan Kegiatan Usaha Pengrajin keripik pisang, gula aren dan sembako. Dalam menjalankan usahanya, pemilik pasti memiliki kendala dan alasan dalam mengembangkan usahanya serta kesulitan – kesulitan yang dianggap menghambat berjalannya usaha para pengrajin ini (Omega & Mardiana, 2020). Ada pun kendala yang menghambat usaha para pengrajin ini dalam implementasi SAK EMKM adalah :

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Semua pencatatan juga tidak dicatat sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
- b. Tidak adanya pembagian tugas dan sistem manajemen yang belum terarah untuk membentuk usaha yang baik. Dalam setiap pengambilan keputusan masih berdasarkan asumsi pemilik semata, tidak melihat transaksi historis di periode sebelumnya karena tidak adanya dasar pengambilan keputusan yaitu laporan keuangan

### **Pembahasan Implementasi Keuangan**

Dalam usaha yang dilakukan oleh para pengrajin di desa Ujung Rambe Kabupaten Deli serdang selama ini, mestinya (Lestari, 2018). Alasannya karena mereka tidak ada niat dan kepentingan bagi pencatatan ini baik hanya untuk melihat keuntungan maupun mengevaluasi penjualan dan pendapatan selama setahun. (Nurdwijayanti & Ulastiningsih, 2018) Alasan ini sangatlah berbanding terbalik dengan ketentuan yang berlaku dalam siklus akuntansi. Selama ini para pengrajin di desa Ujung Rambe tidak melakukan pencatatan serta menyimpan bukti transaksi (Warsono et al., 2010).

Desa Ujung Rambe merupakan desa di salah satu Kabupaten Deli Serdang yang masih sangat terbelakang dan kurang mengetahui laporan keuangan. Sangat banyak UMKM yang tidak mengetahui betapa pentingnya laporan keuangan pada UMKM (Uskara, 2021). Maka dari itu, penulis melakukan sosialisasi pentingnya laporan keuangan pada UMKM dengan harapan UMKM di Desa Ujung Rambe mampu mengetahui kinerja bisnis yang dijalankannya dan dapat mengambil keputusan terhadap bisnisnya (Hasanah et al., 2019).

Hal ini dapat meningkatkan perkembangan UMKM, karena laporan keuangan sangat penting bagi UMKM. Karena mencerminkan kinerja bisnis dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sudah sangat banyak masyarakat di Desa Ujung Rambe yang memiliki UMKM, tinggal lagi mahasiswa akan membantu para pemilik UMKM dalam memberitahu pentingnya laporan keuangan pada UMKM agar dapat melihat kinerja bisnis yang dijalankannya (Handini et al., 2019).

- Dokumentasi sosialisasi pentingnya laporan keuangan pada UMKM keripik pisang.



Gambar 1. Proses Pembuatan Keripik Pisang



Gambar 2. Proses Pengorengan Keripik Pisang



Gambar 3. Keripik Pisang Sudah di Bungkus



- Dokumentasi sosialisasi pentingnya laporan keuangan pada UMKM gula aren



Gambar 4. Menjelaskan Kegunaan Laporan Keuangan



Gambar 5. Gula Aren Siap Dipasarkan

- Dokumentasi sosialisasi pentingnyalaporan keuangan pada UMKM ibu Sukinah



Gambar 6. Menjelaskan kegunaan laporan keuangan usaha Sembako



- Dokumentasi, sosialisasi pentingnya laporan keuangan pada UMKM Ibu Ita



Gambar 7. Menjelaskan kegunaan laporan keuangan usaha dagang

Dengan adanya sosialisasi ini, semoga para pemilik UMKM di Desa Ujung Rambe dapat memahami pentingnya laporan keuangan pada UMKM oleh mahasiswa. Dan UMKM di Desa Ujung Rambe dapat mengetahui kinerja bisnisnya dan dapat mengambil keputusan bisnis yang dijalkannya serta UMKM di Desa Ujung Rambe semakin maju (Widyatama & Suprpty, 2018)

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dengan diadakannya pengabdian mahasiswa ke Desa Ujung Rambe semoga dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di desa tersebut. Seperti masalah banyak yang belum mengetahui tentang laporan keuangan. Semoga dengan adanya sosialisasi ini permasalahan di Desa Ujung Rambe dapat diatasi. Dengan pahami nya mengenai laporan keuangan dan menggunakan untuk UMKM. semoga UMKM di jalan semakin maju, dan dapat membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat lainnya yang tidak mempunyai pekerjaan dikarenakan akses yang susah untuk mencari kerja di kota atau sedikitnya lapangan pekerjaan di Desa Ujung Rambe. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan UMKM di Desa Ujung Rambe.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa pada kesempatan ini, penulis mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita, atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT, pengabdiaan masyarakat di Desa Ujung Rambe, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang yang dimulai sejak tanggal 11 - 31 Agustus 2022 dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan dengan baik sehingga penulis dapat menulis artikel ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, D. (2021). Pengembangan UMKM. PT. Refika Aditama.
- Amani, T. (2018). Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 12-30.
- Amoako, G. (2013). Accounting Practices of SMEs: A Case Study of Kumasi Metropolis in Ghana, *Int. Jurnal Bus. Manag*, 8(24), 73-83.
- Anoraga, P. (1997). Manajemen bisnis. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (14th ed.). Rineka Cipta.
- Ayodya, W. (2020). *UMKM 4.0: Strategi UMKM Memasuki Era Digital*. Elek Media Komputindo.
- Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Bank Indonesia.
- Danang, S. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Untuk Bisnis* (1st ed.). CAPS.
- Effendi, S. & T. (2012). *Metode Penelitian Survei* (30th ed.). LP3ES.
- Hadri, M. (2013). *Memahami Akuntansi Dasar: Pendekatan Teknis Siklus Akuntansi* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.
- Handini, S., Sukei, & Kanty, H. (2019). *Manajemen Umkm Dan Koperasi (Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai)*. Unitomo Press.
- Hanim, L., Noorman, M., & M.Tr.Han. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (D. R. Hartono (ed.); Pertama). Unissula Press.

- Harnanto. (2019). *Dasar-Dasar Akuntansi (II)*. 1st Published.
- Hasanah, N., Muhtar, S., & Muliastari, I. (2019). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Galih (ed.); Pertama)*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajagrafindo Persada.
- Kompas, L. (2022). *Digitalisasi UMKM Topang Pemulihan Ekonomi*. Kompas Penerbit Buku.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Lestari, W. M. (2018). *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atas Pencatatan Laporan Keuangan pada UMKM Photo Priyangan*. Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi.
- Muditomo, A. (2012). *Jurnal Mencermati Peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia*. Praktisi Perbankan BUMN.
- Munawir. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty.
- Nurdwijayanti, N., & Ulastiningsih. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Di Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta)*. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.496>
- Octavia, A., Erida, Sumarni, & Sam, I. (2016). *Pelatihan Kewirausahaan Dan Manajemen Bagi Ibu Rumah Tangga, Remaja Putri Dan Kelompok Usaha Bersama Mutiara Kota Jambi*. *Jurnal ABDIMAS Unmer Malang*, 31(6), 43-53. <https://doi.org/ISSN: 2548-7159>

- Omega, T. N., & Mardiana, L. (2020). Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Study Kasus Pada Pengrajin Tas Ibu Indra Suriyanti). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(2), 134-152.
- Pertiwi, D., Pasolo, M. R., & Rasyid, A. (2020). Penyajian Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Jayapura," *Account. Jurnal Uniyap*, 2(1), 1-9.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Ke Enam Be)*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*. Pustaka Baru Press.
- Tambuhan, T. T. ., & Nazwar, A. (2009). *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang. (2008). UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bab VI Pasal 20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. (2012). *Tentang Perkoperasian*.
- Uskara, A. (2021). *UMKM Adalah Kunci Membangkitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*. Rakyat Merdeka Books.
- Warsono, S., Sagoro, E. M., Ridha, M. A., & Darmawan, A. (2010). *akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami & Dipraktikkan*. Buku Akuntansi.
- Widyatama, A., & Suprpty, R. (2018). *Dasar dasar Akuntansi untuk Pemula*. IKPI.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi UMKM*. Gava Media.
- Wilantara, R. F., & Susilawati. (2016). *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*. Refika Aditama.